

# STRATEGI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN MELALUI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

I Made Yoga Jaya Kusuma

NPP. 31.0724

Asdaf Kota Denpasar, Provinsi Bali

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: [yogajaya56@gmail.com](mailto:yogajaya56@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem statement/background (GAP):** Food vulnerability is a social issue that is still very difficult to solve, both at the central and regional levels. This necessitates the need for a strategic and sustainable policy-making process to address this issue. The Denpasar City Government through the Social Service as the implementer of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) since 2018, considering Denpasar City as the provincial capital with heterogeneous social conditions, including phenomena such as poverty, unemployment, and food vulnerability within it. Therefore, researchers are interested in examining how the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program addresses Food Vulnerability in Denpasar City. **Purpose:** The objectives of this research are to identify the strategies for addressing food insecurity through the Non-Cash Food Assistance program in Denpasar City. Additionally, this research aims to describe the challenges faced in the strategy for addressing food insecurity through this program. Lastly, the research seeks to identify solutions to the challenges encountered in the strategy for addressing food insecurity through the Non-Cash Food Assistance program in Denpasar City. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The research location is in Denpasar City with informants selected through Purposive Sampling technique. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. This research also utilizes Triangulation in data analysis. **Result:** The results of this study reveal and describe how the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Denpasar City has been fairly successful since 2018. Although it is deemed fairly successful, there are still some challenges in the implementation of this program such as inadequate facilities, technical issues, and the government's efforts to address existing problems are still not optimal. **Conclusion:** Despite these challenges, this assistance program has had a significant impact on reducing food vulnerability in Denpasar City.

**Keywords:** Strategy, Non-Cash Food Assistance Program (BPNT), Food Vulnerability

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kerawanan pangan merupakan suatu masalah sosial yang hingga saat ini masih sangat sulit untuk dipecahkan baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan perlu adanya strategi pada proses pembuatan kebijakan yang tepat serta berkesinambungan agar permasalahan ini mampu diatasi. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak 2018 mengingat Kota Denpasar merupakan merupakan ibukota provinsi dengan kondisi sosial yang heterogen, termasuk fenomena kemiskinan, pengangguran dan kerawanan pangan di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam mengatasi Kerawanan Pangan di Kota Denpasar. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dalam menangani kerawanan pangan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Denpasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam strategi penanganan kerawanan pangan melalui program tersebut. Terakhir, penelitian ini berusaha untuk menemukan solusi atas kendala yang muncul dalam strategi penanganan kerawanan pangan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Denpasar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kota Denpasar dengan teknik pemilihan informan secara *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan Triangulasi dalam menganalisis data. **Hasil/Temuan:** Adapun hasil daripada penelitian ini adalah mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Denpasar yang telah berjalan cukup baik sejak tahun 2018. Meskipun dikatakan sudah cukup baik, namun kenyataannya masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini seperti sarana yang kurang memadai, masih adanya masalah teknis dalam pelaksanaan program, serta upaya pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada masih belum optimal. **Kesimpulan:** Meskipun terdapat permasalahan namun program bantuan ini cukup berdampak dalam penurunan tingkat kerawanan pangan di Kota Denpasar.

**Kata Kunci :** Strategi, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kerawanan Pangan

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Bencana merupakan kejadian yang merugikan dan merusak, sering kali disebabkan oleh alam atau aktivitas manusia, dengan dampak serius pada kehidupan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Manajemen bencana dan upaya pencegahan menjadi penting untuk mengurangi dampak negatifnya. Indonesia, sebagai negara dengan pertumbuhan penduduk tinggi, menghadapi berbagai masalah sosial, salah satunya adalah kerawanan pangan. Peningkatan jumlah penduduk memengaruhi aspek sosial ekonomi dan menyebabkan kelangkaan pangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi pangan.

Kerawanan pangan di Indonesia disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, perubahan iklim, distribusi pangan yang tidak efisien, dan kurangnya koordinasi kebijakan pangan. Kemiskinan memperparah situasi ini, mencerminkan rendahnya pemenuhan kebutuhan pangan pada tingkat rumah tangga. Sistem distribusi pangan yang tidak optimal menyebabkan kesulitan dalam mendistribusikan surplus pangan ke daerah yang membutuhkan, memperburuk kerawanan pangan.

Meskipun Bali menjadi tujuan wisata utama akan tetapi masih menghadapi masalah kerawanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan permintaan pangan, sementara lahan pertanian terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, menyebabkan ketergantungan pada pasokan dari luar kota. Perubahan pola konsumsi dan kendala logistik menambah tekanan pada sistem pangan. Di Denpasar, isu kerawanan pangan semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang intens.

Upaya penguatan ketahanan pangan di Denpasar mencakup revitalisasi pertanian perkotaan, promosi pertanian berkelanjutan, dan diversifikasi sumber pangan. Inovasi dalam manajemen distribusi pangan dan penerapan teknologi untuk monitoring pasokan dan permintaan juga penting. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan. BPNT mentransformasikan bantuan tunai menjadi non tunai, memanfaatkan sistem perbankan untuk memudahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh sembako di e-Warong.

Namun, pelaksanaan BPNT menghadapi kendala seperti keterlambatan *update* data warga, belum tepatnya sasaran penerima bantuan, dan masalah administrasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi penanganan kerawanan pangan melalui program BPNT di Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk mengetahui sejauh mana program ini efektif dalam menangani kerawanan pangan di daerah tersebut.

## 1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai bencana sosial dan kerawanan pangan di Indonesia, khususnya di Kota Denpasar, telah banyak dilakukan. Latar belakang yang ada menjelaskan berbagai faktor penyebab kerawanan pangan, seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, dampak perubahan iklim, sistem distribusi pangan yang tidak efisien, serta masalah kemiskinan dan ekonomi. Selain itu, ada upaya pemerintah melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk mengatasi masalah ini. Namun, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diteliti lebih lanjut. **Pertama**, evaluasi mendalam mengenai efektivitas program BPNT dalam jangka panjang belum banyak dilakukan, sehingga perlu diteliti apakah program ini benar-benar efektif dalam mengurangi kerawanan pangan secara signifikan di berbagai tingkat masyarakat, terutama di wilayah perkotaan seperti Denpasar. **Kedua**, sektor pertanian di Indonesia masih didominasi oleh metode tradisional, sehingga diperlukan penelitian tentang bagaimana teknologi pertanian modern dapat diterapkan lebih luas dan efektif serta bagaimana teknologi tersebut dapat diintegrasikan dengan program BPNT. **Ketiga**, kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pangan, sehingga penelitian tentang mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah sangat diperlukan. **Keempat**, sistem distribusi pangan yang tidak optimal masih menjadi kendala utama dalam penanganan kerawanan pangan, sehingga

diperlukan penelitian lebih lanjut tentang cara-cara inovatif untuk memperbaiki sistem distribusi pangan. **Kelima**, dampak sosial dan ekonomi dari kerawanan pangan terhadap komunitas lokal belum banyak dieksplorasi, sehingga studi mengenai dampak kerawanan pangan terhadap aspek sosial seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan stabilitas sosial dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif. **Keenam**, meskipun telah ada program pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan, upaya lokal yang berkelanjutan dan mandiri masih kurang diteliti, sehingga penelitian tentang partisipasi aktif komunitas lokal dalam mengelola ketahanan pangan sangat diperlukan. **Ketujuh**, perubahan pola konsumsi masyarakat menuju makanan siap saji dan urbanisasi yang pesat menambah kompleksitas masalah kerawanan pangan, sehingga diperlukan penelitian yang mengkaji dampak dari perubahan ini terhadap sistem pangan perkotaan. **Kedelapan**, masalah data yang tidak *update* dan kurang akurat dalam program BPNT menunjukkan perlunya sistem pengelolaan data yang lebih baik, sehingga penelitian tentang metode dan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan data penerima bantuan sangat penting. Dengan mengidentifikasi kesenjangan ini, penelitian yang diusulkan akan berfokus pada strategi yang lebih komprehensif dan holistik dalam menangani kerawanan pangan melalui program BPNT di Kota Denpasar, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia secara keseluruhan.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai fokus dan lokasi. Fajar Syamsul Ma'ruf (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mensejahterakan Keluarga Kurang Mampu di Tangerang" menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPNT di Tangerang kurang optimal karena masalah sumber daya dan pelaksanaan program, namun ada dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat. Persamaannya adalah fokus pada pelaksanaan BPNT, sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Idzhar Nurcahyo (2022) juga menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitiannya "Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi". Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT belum optimal karena kendala pada sumber daya dan pelaksana program, dengan kesamaan terletak pada pembahasan mengenai implementasi BPNT namun dilakukan di lingkup kecamatan. Retno Wintari (2020) dalam penelitiannya "Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Dondong, Jetis, Saptosari, Gunungkidul" juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan BPNT di sana telah optimal, meningkatkan pendapatan, pendidikan, gizi, kesehatan, dan rasa sosial masyarakat. Persamaannya adalah fokus pada pelaksanaan BPNT, dengan perbedaan pada teori kesejahteraan yang digunakan. Iper Riyansuni dan Joni Devitra (2020) dalam "Analisis Dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dengan *Simple Additive Weighting (SAW)* Pada Dinas Sosial Kota Jambi" menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk membahas *prototype* sistem pendukung keputusan dengan SAW, menemukan bahwa verifikasi dan validasi status penerima masih sulit. Penelitian ini relevan dengan topik bantuan sosial, namun berbeda dalam lokasi dan *output*

penelitian. Feny Sahara, Faizal Anwar, dan Titi Darmi (2022) meneliti "Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu" dengan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan disposisi atau sikap pihak pelaksana BPNT efektif dan sesuai peraturan, dengan perbedaan pada hasil, lokasi, dan subjek penelitian, namun tujuan pembahasan tetap sama.

#### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pembahasan dan menganalisis data hasil penelitian, penulis merujuk hasil penelitian terdahulu, diantaranya **pertama**, penelitian dari Fajar Syamsul Ma'aruf (2022) di mana memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPNT dinyatakan kurang optimal akibat indikator sumber daya dan pelaksanaan program. Namun juga terdapat dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat program BPNT. Penelitian **kedua**, Idzhar Nurchayo (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Karena disebabkan oleh kendala pada indikator sumber daya dan pelaksana program.

Selanjutnya pada penelitian **ketiga**, Retno Wintari (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BPNT telah dilaksanakan secara optimal. Karena dapat meningkatkan pendapatan, pendidikan, gizi, kesehatan, dan rasa sosial antar masyarakat. Penelitian **keempat**, Iper Riyansuni dan Joni Devitra melakukan penelitian yang membahas mengenai prototype Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dengan Simple Additive Weighting (SAW). Dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat mengatasi permasalahan yang ada serta masyarakat miskin mendapatkan haknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada penduduk miskin belum optimal karena sulitnya verifikasi dan validasi status keberhakannya. Pada penelitian **kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Feny Sahara dkk. (2022) meninjau topik masalah mengenai Disposisi atau sikap pihak pelaksana dalam implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terpantau dengan baik di masyarakat Kabupaten Muara Bangkahulu, sehingga pelaksanaan Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan efektif.

Kemudian pada penelitian **keenam**, M. Irsyad Rahmadani, Effiyaldi (2019) melakukan penelitian yang menghasilkan sebuah *prototype* sistem informasi pendataan KPM BPNT yang nantinya akan diterapkan pada sistem pendataan KPM BPNT pada Dinas Sosial Kota Jambi. Penelitian **ketujuh**, M. Hidayat Panuntun Muslim (2019) menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai belum dapat dijalankan sesuai SOP yang ada dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak memahami program BPNT. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan belum berjalan dengan baik. Berikutnya pada penelitian **kedelapan**, Luh Ayu Sulasmini dan I Kadek Juni Arta (2022) menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem ini, maka pemerintah desa sangat terbantu untuk mengambil keputusan dalam menyeleksi calon penerima BPNT. Mempermudah menentukan calon penerima BPNT

yang ideal serta menggunakan 14 pedoman kriteria dan menerapkan 9 kriteria yang akan dijadikan acuan dalam melakukan proses seleksi .

Pada penelitian berikutnya yaitu penelitian **kesembilan**, Imal Alimah Akmal (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum tercapai maksimal karena terdapat masalah pada mesin edc sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan. Penelitian terakhir yaitu penelitian **kesepuluh**, Andre Agus Kurniawan (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan 5 indikator pengukuran efektivitas program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sudah efektif karena melihat pada 4 variabel (pemahaman program, ketepatan, tercapainya tujuan dan perubahan nyata) yang sudah efektif dan hanya variabel ketepatan sasaran yang masih belum efektif.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam menangani kerawanan pangan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Denpasar, mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut, serta mengidentifikasi solusi atas kendala yang muncul dalam strategi penanganan kerawanan pangan melalui program BPNT di Kota Denpasar.

## **II. METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program BPNT, serta untuk mengeksplorasi solusi-solusi yang tepat dalam penanganan permasalahan yang ada. Menurut Bogdan Taylor dalam Wiratna (2014), penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang melibatkan pengumpulan data berupa kata-kata atau catatan yang berkorelasi dengan makna, nilai, pendapat, atau pemahaman terhadap perilaku yang diamati berdasarkan perspektif seseorang. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dalam metode kualitatif untuk menggambarkan dengan jelas strategi penanganan kerawanan pangan melalui program BPNT, serta untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul.

Operasional konsep digunakan untuk membantu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data agar terhindar dari kesalahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep strategi menurut Kooten dalam Salusu (2006: 104-105) sebagai landasan analisis. Kooten mengemukakan bahwa strategi dapat dipetakan menjadi empat dimensi, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya, dan strategi kelembagaan.

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2013), sumber data merupakan faktor penting dalam pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara semi-struktur dengan pihak terkait dalam pelaksanaan program BPNT di Kota Denpasar. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh melalui studi literatur dalam artikel, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan yang dimintai informasi disebut sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program BPNT di Kota Denpasar, serta masyarakat sebagai objek dalam

pelaksanaan program ini. Daftar informan termasuk kepala dinas, koordinator program, dan perwakilan keluarga penerima BPNT. Dengan melibatkan berbagai informan dari berbagai latar belakang, diharapkan penelitian ini dapat menggali pemahaman yang komprehensif tentang implementasi program BPNT di Kota Denpasar.

### **III. HASIL/PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Strategi Kooten untuk menganalisis strategi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui empat jenis strategi utama yaitu sebagai berikut:

1. Strategi organisasi;
2. Strategi program;
3. Strategi sumber daya;
4. Strategi kelembagaan.

#### **3.1 Strategi Organisasi**

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan inisiatif transformasi dari Program Beras Miskin (Raskin) yang telah berjalan sejak tahun 2018 dan terus dilanjutkan hingga tahun 2024. Program ini dianggap sebagai langkah yang signifikan dalam meringankan beban masyarakat tidak mampu, yang memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan nyata kepada warga yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan dalam program ini berupa telur dan beras, bertujuan untuk membantu keluarga miskin mengurangi pengeluaran pangan dan memenuhi kebutuhan akan gizi seimbang. Implementasi program BPNT juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama bagi usaha kecil pedagang yang dimanfaatkan sebagai tempat distribusi bantuan, yang dikenal dengan istilah E-Waroeng. Kesuksesan suatu program seperti BPNT perlu didukung oleh indikator dan fakta lapangan yang menggambarkan keberhasilan dan kesesuaian program tersebut dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan program BPNT adalah tepat sasaran. Hal ini mengacu pada penerimaan bantuan oleh keluarga tidak mampu yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Wawancara dengan salah satu KPM, ibu Yasmin, menunjukkan bahwa bantuan ini diterima oleh keluarga yang memang membutuhkan bantuan pangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, keberhasilan program juga dapat dilihat dari aspek ketepatan waktu dalam pendistribusian bantuan. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa pendistribusian dana ke rekening KPM belum konsisten dan terkadang terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar kepuasan KPM terjaga dan program BPNT dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat jumlahnya, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima. Berdasarkan pendapat beberapa KPM seperti Bapak Abdul Qadir, Bapak Anwar, Bapak I Made Wirata, dan Ibu Iluh, bantuan sebesar Rp. 200.000 sangat membantu dalam menutupi pengeluaran pokok terutama untuk bahan pangan seperti beras dan telur. Namun, masih ada harapan agar bantuan ini bisa lebih fleksibel dan dapat ditukarkan dengan bahan pangan lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, penting juga untuk memastikan bahwa distribusi bantuan

berjalan dengan harga yang tepat, tanpa adanya pungutan biaya tambahan kepada masyarakat. Proses administrasi juga harus tepat, yang terlihat dari penerimaan bantuan oleh keluarga yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan pemahaman masyarakat terkait prosedur penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, program BPNT di Kota Denpasar telah memberikan dampak positif bagi masyarakat tidak mampu. Meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakpastian dalam pendistribusian dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam penyaluran bantuan, namun langkah-langkah ini merupakan upaya yang penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi penerima.

### **3.2 Strategi Program**

Strategi program BPNT melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas pelaksanaannya. Tahap pertama adalah pendataan keluarga penerima bantuan, dimulai dengan pendaftaran calon KPM yang membawa dokumen pendukung seperti surat pemberitahuan dan dokumen identitas. Identitas calon KPM diperiksa oleh perangkat desa/kelurahan untuk validitas dan kelengkapannya. Jika data sudah benar, akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Denpasar, namun jika terdapat kesalahan, koordinasi dilakukan dengan pihak desa/kelurahan untuk perbaikan. Data KPM yang sudah sesuai akan diinput ke dalam aplikasi SIKS-NG oleh Dinas Sosial Kota Denpasar. Jika jumlah data kurang dari kuota di kabupaten/kota, calon KPM yang memenuhi syarat DTKS akan diusulkan. Sebaliknya, jika jumlah data lebih dari kuota, jumlah calon KPM akan disesuaikan dengan pagu yang telah ditetapkan. Untuk memastikan ketepatan data, Dinas Sosial Kota Denpasar akan melakukan pengecekan langsung ke tempat tinggal penduduk yang terdata. Jika terjadi perubahan data KPM, akan dilakukan musyawarah di lurah/desa. Masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan dapat melaporkan dirinya ke pihak desa/kelurahan atau langsung ke Dinas Sosial untuk dipastikan kelayakannya. Pembukaan rekening merupakan tahap berikutnya, di mana Bank Himbara akan membuka rekening kolektif untuk semua KPM dan memberikan kartu elektronik KKS. Pihak bank akan melaporkan jumlah KPM yang memiliki rekening kepada Kementerian Sosial. Meskipun masih ada kendala dalam pembukaan rekening, seperti persyaratan dokumen yang lengkap dan valid, pihak terkait akan selalu membantu KPM untuk memperbaiki dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, sosialisasi kepada KPM dilakukan oleh Tim Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Pendamping Program Keluarga Harapan, didampingi oleh perangkat Desa/Kelurahan dan bank penyalur. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan kebijakan, mekanisme, prinsip pelaksanaan, tata cara, serta pelaporan jika terjadi masalah saat program berjalan.

### **3.3 Strategi Sumber Daya**

Strategi sumber daya dalam pelaksanaan program BPNT melibatkan beberapa aspek yang krusial, salah satunya adalah kinerja dan kompetensi pegawai Dinas Sosial. Kinerja dan kompetensi ini menjadi penentu utama keberhasilan distribusi BPNT, yang bertujuan membantu masyarakat dengan efektif dan efisien melalui mekanisme non tunai. Pegawai dengan kinerja baik mampu mengelola dan mengkoordinasikan tahapan

distribusi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kompetensi yang baik, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap, memungkinkan pegawai untuk memahami peraturan, mengelola data, dan berinteraksi dengan masyarakat penerima bantuan dengan efektif. Selain itu, koordinasi antar pegawai dalam Dinas Sosial juga berperan penting dalam kelancaran distribusi BPNT. Tim yang solid dan saling mendukung akan lebih efisien dalam menangani berbagai permasalahan yang mungkin muncul. Wawancara dengan salah satu KPM menunjukkan bahwa sumber daya aparatur di Dinas Sosial Kota Denpasar telah mampu mengakomodasi kebutuhan KPM, namun masih perlu ditingkatkan kecakapan pegawai agar pelayanan dapat diberikan dengan lebih cepat. Aspek sarana dan prasarana juga menjadi fokus dalam strategi sumber daya. Berbagai infrastruktur, seperti infrastruktur teknologi informasi, pusat distribusi atau gudang penyimpanan, serta transportasi, telah dikembangkan untuk mendukung distribusi BPNT. Infrastruktur ini memungkinkan pengelolaan data yang efisien, pemantauan distribusi, dan pengiriman bantuan yang tepat waktu. Pemerintah Kota Denpasar juga melibatkan berbagai fasilitas pelayanan publik sebagai titik distribusi, untuk memudahkan akses bagi penerima manfaat. Dalam hal anggaran, pemerintah pusat yang mengelola sepenuhnya anggaran untuk program BPNT, dengan koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saldo BPNT disalurkan langsung oleh pemerintah pusat tanpa campur tangan pihak ketiga, sehingga memastikan integritas dan transparansi dalam distribusi dana. Dinas Sosial Kota Denpasar hanya bertugas sebagai fasilitator antara KPM dengan pemerintah pusat, tanpa ikut campur dalam mobilitas dana BPNT. Kerja sama dengan bank sebagai penyalur dana BPNT juga menjadi bagian dari strategi sumber daya. Bank yang ditunjuk sebagai distributor dana BPNT, termasuk dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan distribusi dana BPNT kepada penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan transparansi dalam distribusi dana BPNT di tingkat lokal.

### **3.4 Strategi Kelembagaan**

Dinas Sosial Kota Denpasar telah mengambil langkah-langkah inovatif dalam distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial pemerintah. Melalui program ini, Dinas Sosial memainkan peran penting dalam memastikan bantuan tersebut mencapai sasaran yang tepat dengan efisiensi dan transparansi. Proses pendataan yang komprehensif terhadap keluarga penerima manfaat potensial menjadi salah satu langkah kunci dalam memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat. Selanjutnya, Dinas Sosial berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk bank atau lembaga keuangan lainnya, untuk mengelola distribusi BPNT. Kerjasama ini membantu memastikan keamanan dan keandalan dalam distribusi dana bantuan. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Ibu I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, SS., M. Hum, menyatakan bahwa langkah-langkah inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan BPNT oleh masyarakat Kota Denpasar. Dinas Sosial terus melakukan pendataan komprehensif dan peninjauan berkala terhadap semua KPM untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan tepat. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara distribusi BPNT, Dinas Sosial Kota Denpasar berkoordinasi dengan Dinas Perikanan

dan Ketahanan Pangan. Kerjasama antara kedua dinas ini menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program tersebut. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan yang berkualitas bagi masyarakat, sementara Dinas Sosial bertanggung jawab dalam pendataan, identifikasi, dan pendampingan terhadap keluarga penerima BPNT. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memaksimalkan proses distribusi dan menurunkan tingkat kerawanan pangan. Mereka bekerja sama dalam menentukan alokasi bantuan pangan, mengatur distribusi bantuan, dan memastikan ketersediaan bahan pangan di setiap e-Waroeng. Kolaborasi ini dimulai dari tahap perencanaan hingga implementasi program, di mana keduanya bekerja sama dalam mengatur distribusi bantuan dan pendistribusian dana bantuan kepada penerima BPNT.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan pembahasan di atas, kondisi saat ini menunjukkan bahwa program BPNT yang telah terlaksana sejak tahun 2018 menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan perekonomian Indonesia. Program ini terus berlanjut dan diimplementasikan di seluruh daerah sebagai bentuk realisasi program nasional penanggulangan kemiskinan dan kerawanan pangan. Program ini menjadi ajang peningkatan perekonomian masyarakat kurang mampu dengan berkolaborasi dengan E-Waroeng.

Pada dimensi strategi organisasi, BPNT wajib diterima keluarga tidak mampu yang terdaftar KPM sehingga program ini terdistribusi secara total. Kementerian Sosial menambah menambah kuota DTKS setiap tahunnya. Fakta yang didapatkan di lapangan yaitu bahwa pendistribusian dana ke rekening KPM tidak konsisten terjadi ataupun tepat dari jadwal yang ditetapkan. jumlah bantuan Rp. 200.000,00 ke rekening KPM dapat ditukarkan dengan telur dan beras, sehingga harapannya bisa menambah gizi tambahan untuk KPM serta berkurangnya pengeluaran terkhususnya pada pangan. Dalam distribusi bantuan ini, tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Distribusi bantuan sosial di Kota Denpasar telah berhasil menyelesaikan proses administratifnya, yang terbukti dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan diisi ulang saldo setiap bulannya. Pada dimensi strategi program secara keseluruhan membahas mengenai proses pembukaan rekening hingga penerimaan bantuan di setiap E-Waroeng. Pada dimensi strategi sumber daya, sumber daya aparatur di Dinas Sosial Kota Denpasar sudah mampu mengakomodasi kebutuhan KPM. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kecakapan pegawai agar dapat memberikan pelayanan secepat mungkin sehingga mengurangi potensi keluhan masyarakat terkait efisiensi layanan BPNT. Pada dimensi strategi kelembagaan, Dinas Sosial melakukan pendataan yang komprehensif terhadap keluarga penerima manfaat potensial. Selanjutnya, Dinas Sosial bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk mengelola distribusi BPNT.

Dalam implementasi program BPNT di Kota Denpasar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu masih adanya masyarakat miskin/kurang mampu yang belum terdata, penyaluran dana bantuan yang belum konsisten, dan Kurang maksimalnya pemberian layanan dari E-Warong kepada Keluarga Penerima Manfaat. Untuk mengatasi masalah

tersebut, Dinas Sosial Kota Denpasar melakukan beberapa upaya, yaitu melakukan peninjauan ke rumah Keluarga Penerima Manfaat guna memastikan kelayakan penerima bantuan, memberikan label atau tanda pada rumah warga yang termasuk Keluarga Penerima Manfaat, serta bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Penelitian yang dilakukan peneliti mengangkat konsep kebaruan (*novelty*) yaitu Strategi Penanganan Kerawanan Pangan melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Denpasar Provinsi Bali. Penelitian ini berfokus pada Strategi program BPNT dalam mengatasi ketidakcukupan konsumsi pangan yang dialami oleh KPM.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Denpasar telah berhasil mengadopsi strategi yang efektif dalam penanganan kerawanan pangan melalui penerapan teknologi informasi dan koordinasi yang baik antara pegawai Dinas Sosial. Dalam strategi ini, fokus diberikan pada peningkatan kualitas pegawai, infrastruktur teknologi informasi, pusat distribusi, dan optimalisasi transportasi, dengan memperkuat pendekatan inklusif melalui titik distribusi di pusat-pusat kecamatan atau kelurahan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan saat penelitian ini dilakukan yaitu masalah terkait penerima manfaat yang belum terdata dan perpindahan alamat KPM menjadi tantangan utama dalam menjaga kelancaran distribusi BPNT, ketidakpastian akibat penyaluran dana yang tidak konsisten setiap bulan menciptakan situasi sulit bagi penerima manfaat, kemudian kendala teknis seperti ketersediaan stok barang di E-Warong dan masalah teknis pada mesin EDC, juga menambah kompleksitas pelaksanaan program.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan peninjauan langsung ke rumah penerima manfaat untuk memastikan validitas data dan mencegah kesalahan input, memberikan label pada rumah KPM untuk mengurangi tumpang tindih, dan kerja sama erat antara Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil untuk pemutakhiran data, menjadi solusi-solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program BPNT di Kota Denpasar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan program ini dapat terus berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif yang lebih besar dalam menangani kerawanan pangan di wilayah tersebut.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penelitian kami yang berjudul "Strategi Penanganan Kerawanan Pangan Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Denpasar Provinsi Bali". Terima kasih atas dukungan, partisipasi, dan kontribusi berharga yang telah diberikan dalam menjalankan penelitian ini. Dengan kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, kami dapat menyelenggarakan penelitian ini dengan baik dan menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi upaya penanggulangan kerawanan pangan di Kota Denpasar. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan implementasi program-program bantuan pangan di wilayah ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, I. A. (2020). Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Skripsi Oleh Imal Alimah Akmal Program Studi Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Washiyah Volume 1 No 2*.
- Fajar, S. (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Mensejahterakan Keluarga Kurang Mampu di Tangerang. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Indrianto, N. & Bambang, S. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFPE.
- Kurniawan, A. A. (2020). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. *Administrasi Negara*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Muslim, H.P., Eriyanti, F. & Mubarak, A. 2019. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1): 60–68.
- Nurcahyo, I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- Rahmadani, M.I. & Effiyaldi 2019. Informasi Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Dinas Sosial Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 4(4): 444– 454.
- Riyansuni, I. & Devitra, J. 2020. Analisis Dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dengan Simple Additive Weighting (SAW) Pada Dinas Sosial Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 5(1): 151–163.
- Sahara, F., Anwar, F. & Darmi, T. 2022. Tersedia Online di <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP> Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu setiap negara . Dalam arti yang lebih kecil , kemelaratan dianggap sebagai kondisi ( BPNT ). di. 4(September): 107–116.
- Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Sulasmini, L.A. & Arta, I.K.J. 2022. Seleksi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Desa Sepang Dengan Metode Simple Additive. *Jurnal Manajemen dan Teknologi*, 12(2): 1–11. Tersedia di <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/jmti/article/view/2109%0Ahttps://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/jmti/article/download/2109/1635>
- Wintari, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Dondong, Jetis, Saptosari, Gunungkidul. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Wiratna, S. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.